

## Dugaan Korupsi Proyek Bendungan Tapin, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Akan Periksa 6 Saksi



Sumber gambar:

<https://kalsel.inews.id/berita/dugaan-korupsi-proyek-bendungan-tapi-kejati-kalsel-akan-periksa-6-saksi/2>

Satu lagi kasus dugaan korupsi terkait proyek besar di Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel).

Kali ini, penyidikan atas kasus dugaan korupsi pada tahapan pengadaan lahan terkait proyek pembangunan Bendungan Tapin di Kalsel tengah dilakukan oleh Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejati Kalsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Romadu Novelino mengatakan, Penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap enam saksi.

"Sudah dipanggil enam orang, besok Senin (6/6/2022) penyidik dijadwalkan untuk memeriksa enam saksi ini," kata Novel dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id

Ini merupakan pemanggilan pertama terhadap saksi-saksi dalam proses penyidikan kasus tersebut yang telah dimulai pada Jumat (20/5/2022).

Novel mengatakan, belum dapat menerangkan secara rinci siapa saja nama atau latarbelakang para saksi yang dipanggil tersebut.

"Untuk informasi siapa saja mereka nanti diinformasikan setelah pemeriksaan," ujar Novel.

Ia mengatakan, penyidikan itu didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : print -02/O.3/Fd.2/05/2022.

Dalam Surat Perintah yang diteken Kepala Kejati Kalsel, Mukri itu, diperintahkan sepuluh orang Penyidik untuk melaksanakan penyidikan atas kasus dugaan korupsi tersebut.

Diketahui, Proyek Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel itu merupakan proyek multi years pada Tahun 2015-2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp 1 triliun.

Dimana pada pembangunan fisik bendungan Tapin yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dengan luas genangan sekitar 425 hektare itu, dilakukan pula pengadaan lahan.

"Jadi dugaan korupsinya pada proses pengadaan lahannya," ungkap Novel.

Perkembangan atas penyidikan kasus tersebut kata dia akan disampaikan bertahap kepada masyarakat.

Sedangkan proyek fisik pembangunan Bendungan Tapin diketahui sudah rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Tahun 2020 lalu.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.inews.id/berita/dugaan-korupsi-proyek-bendungan-tapi-kejati-kalsel-akan-periksa-6-saksi/2>, Dugaan Korupsi Proyek Bendungan Tapin, Kejati Kalsel Akan Periksa 6 Saksi, 05 Juni 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/05/dugaan-korupsi-pengadaan-lahan-bendungan-tapin-penyidik-kejati-kalsel-panggil-6-saksi>, Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Panggil 6 Saksi, 05 Juni 2022.

#### **Catatan:**

#### **UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).